

POLITIK IDENTITAS DALAM KONTROVERSI ISU DI INDONESIA

Dinar Astuti¹, Andi Agustang², Idham Irwansyah Idrus³

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Email: dinarastuti1996@gmail.com

Abstract

Identity politics refers to a political strategy that prioritizes and puts forward the importance of a particular group's identity politics approach, such as ethnicity, religion, gender, culture, and inter-group, to influence public opinion and gain political support. The issue of controversy becomes increasingly complex with identity politics; many groups have different political views depending on their identity because personal thoughts and attitudes tend to be influenced by group identity. It can be a source of conflict in society. Identity becoming too crucial in politics will result in polarization and strengthen stereotypes and discrimination in society. The research method used in this research is observation, literature study, and literature study from social media and the internet. For this reason, we must find a balance between identity recognition and unity as a broader society in politics. Shows that identity politics can play an essential role in controversial issues to resolve conflicts and promote dialogue that is inclusive of all groups and must still be balanced with recognition and unity for the larger society to avoid polarization that can undermine our national political stability.

Keywords: Identity Politics, Controversy, Issue

Abstrak

Politik identitas mengacu pada strategi politik yang mengutamakan dan mengedepankan pentingnya pendekatan politik identitas kelompok tertentu, seperti suku, agama, gender, budaya dan antargolongan untuk mempengaruhi opini publik dan mendapat dukungan politik. Kontroversi isu menjadi semakin kompleks dengan adanya politik identitas, banyak kelompok-kelompok memiliki pandangan politik yang berbeda tergantung pada identitas mereka karena pandangan dan sikap individu cenderung dipengaruhi oleh identitas kelompok. Hal inilah yang dapat menjadi sumber konflik dalam masyarakat, Ketika identitas menjadi terlalu penting dalam politik akan mengakibatkan polarisasi dan memperkuat stereotipe serta diskriminasi di dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, study kepustakaan, study literatur dari media sosial dan internet. Untuk itu penting bagi kita menemukan keseimbangan antara pengakuan identitas dan persatuan sebagai masyarakat yang lebih luas dalam menjalankan politik. Menunjukkan bahwa politik identitas dapat memainkan peran penting dalam kontroversi isu untuk mengatasi konflik dan mempromosikan dialog yang inklusif untuk semua kelompok, serta tetap harus diimbangi dengan pengakuan dan persatuan untuk masyarakat yang lebih besar agar menghindari polarisasi yang dapat merusak stabilitas politik nasional kita.

Kata kunci: Politik Identitas, kontroversi, Isu

PENDAHULUAN

Apabila membahas tentang demokrasi, sangat erat kaitannya dengan budaya politik yang ada dan berkembang di tiap-tiap negara di dunia. Budaya politik biasanya berpusat pada pemikiran dari individu yang merupakan dasar semua tingkah laku masyarakat dalam kehidupan politik dan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa adanya hubungan pemerintah dengan masyarakat yang dihubungkan melalui demokrasi yang dikaitkan lebih lanjut dalam budaya politik.

Indonesia sebagai negara berdaulat yang menganut sistem politik demokrasi, hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.

Secara normatif, sistem politik yang dianut di Indonesia di dasarkan atas nilai-nilai bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik di Indonesia adalah sistem politik Demokrasi Pancasila atau sitem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.

Dalam menjalankan sistem perpolitikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pemerintah sebagai instrumen yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan sebuah demokrasi. Pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah yang saling berkaitan.

Terkait dalam proses perpolitikan di Indonesia agar berjalan dengan baik, tidak bisa dipisahkan dengan Pemilu. Meskipun pemilu tidak sama dengan demokrasi, tetapi Pemilu adalah konsep sekaligus wujud nyata dari demokrasi *procedural*. Karena tidak ada satupun negara yang menganut sistem demokrasi yang sepenuhnya dijalankan langsung oleh semua rakyat dan sepenuhnya untuk rakyat, maka pemilu merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (*representative government*). Keikutsertaan masyarakat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis (Budiardjo, 2006).

Pemilihan Umum (Pemilu) masih menjadi peristiwa yang selalu dirayakan rakyat Indonesia. Perayaan pesta demokrasi tersebut masih menjadi agenda rutin yang tidak pernah dilewatkan. Pada sebuah kontestasi politik, kampanye menjadi satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh para kandidat. Kegiatan kampanye merupakan sebuah usaha untuk mempersuasi khalayak (*target*) untuk menerima suatu gagasan atau ide tertentu, seperti yang dituliskan Hal Kotler dan Roberto (dalam Cengara, 2009, h. 284) bahwa Campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others practices and behavior. Hal ini kemudian membuat posisi kampanye menjadi krusial dalam sebuah kontestasi pemilu.

Proses demokrasi di Indonesia merupakan proses demokrasi yang tidak terlepas dari orientasi identitas baik agama, gender, suku, budaya, adat-istiadat dan antargolongan. Hal ini dapat dilihat pada keikutsertaan partai-partai politik yang mengikuti Pemilu sebelumnya. Proses demokrasi, baik dalam Pilkada saja seringkali tidak terlepas dari peran serta beragam partai dengan berbagai ideologi yang ikut merongrong. Dalam Pemilu, berbagai ragam identitas agama, gender, suku, budaya, adat-istiadat dan antargolongan sering kali dijadikan sebagai alat politik.

Di lain pihak, semakin menguatnya isu politik identitas mendapatkan perlawanan sebaliknya dari kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme yang menjunjung tinggi segala macam perbedaan yang sejak awal telah diakui bersamaan dengan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Kelompok nasionalis yang didominasi oleh berbagai identitas kesukuan, agama, ras, adat-istiadat, dan lain-lain ini menjelma sebagai kelompok yang solid dalam menunjukkan eksistensinya.

Pertentangan antara identitas nasionalisme dan identitas agama, suku, budaya, gendern dan antargolongan saat ini semakin meruncing sehingga berpotensi mengganggu stabilitas negara. Perbedaan pandangan mengenai identitas politik tersebut melahirkan berbagai isu

yang meluas di masyarakat berbagai daerah, karena hadirnya propaganda dan klaim antar kelompok terhadap kebenaran. Dalam rangka pemenangan kontestasi pemilu, elite politik menghadirkan isu politik identitas melalui kampanye yang tak lain bertujuan untuk memobilisasi dukungan massa. Sehingga alih-alih dukungan yang diperoleh berdasarkan visi-misi para calon, dukungan masyarakat terhadap kandidat ditentukan oleh sentimen terhadap berbagai ragam perbedaan-perbedaan esensial berupa identitas agama, suku, budaya, gender dan antargolongan.

TINJAUAN PUSTAKA

Politik Identitas

Untuk memperjelas Batasan kajian tentang politik identitas diperlukan pengelaborasi teori dari sejumlah pakar. Mengingat politik identitas merupakan fokus perhatian yang relatif baru dalam perkembangan politik di Indonesia, khususnya terkait dengan penggunaan symbol-simbol tertentu dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Upaya-upaya elite politik untuk menyetengahkan isu-isu primordialisme mencakup identitas agama, suku, budaya, gender dan antargolongan sebagai alat mobilisasi dukungan politik marak terjadi. Sebagai instrument elite politik dalam pemenangan kontestasi politik, pemanfaatan politik identitas justru kerap menimbulkan pembelahan tajam di tengah-tengah masyarakat. Alih-alih masyarakat menentukan pilihannya dalam pemilu berbasis visi-misi kandidat, politik identitas terus diproduksi di ruang public oleh elit agar memperoleh dukungan elektoral.

Menurut Hall dalam Setyaningrum (2005), bahwa pembentukan identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari, *sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitasnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa, ikatan-ikatan kolektif merupakan konsekuensi logis dari kesadaran pentingnya kategori-kategori persamaan sebagai pembentuk identitas.

Akan tetapi di sisi lain, ikatan kolektif dapat sebagai penegas bahwa seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain dan pada saat yang bersamaan identitas juga memformulasikan *otherness* (keberadaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*Categories of difference*).

Sementara Sosiawan (2014:236) menegaskan bahwa identitas adalah sebuah serapan yang diturunkan dari Bahasa Latin, yaitu dari kata *iden* yang artinya sama. Secara filosofis, konsep ini memiliki dua pengertian: 1) *singleness over time* dan; 2) *sameness amid difference*. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa ada persamaan dan perbedaan sekaligus yang dikandung dalam pengertian identitas.

Menurut Barker dalam Sosiawan (2014 : 236), konsep identitas adalah “*it pertains to cultural description of persons with which we emotionally identify and which concern sameness and difference, the personal and the social*”. Barker melanjutkan penjelasannya bahwa identitas itu tidak lain “*the discursive resource that form the material for identity formation are cultural in character*” “identitas adalah sesuatu yang dibentuk dalam interaksi antar individu”.

Sejalan dengan itu, Hall (The Question of Cultural Identity, 1994 dalam Wibowo, 2014), identitas merupakan sesuatu yang secara actual terbentuk melalui proses tidak sadar yang melampaui waktu, bukan kondisi yang terjadi begitu saja dalam kesadaran semenjak lahir. Identitas menyisakan ketidaklengkapan, selalu “dalam proses”, “ sedang dibentuk”. Identitas juga menyangkut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan lainnya.

Politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (*Political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*) (Haboddin, Muhtar, 2012). *Political identity* merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Politik identitas siasakan pada esensialisme strategis, dimana kita bertindak seolah-olah identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu.

Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politik untuk mengedepankan kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada suku, agama, budaya, gender, dan antargolongan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik identitas merupakan Tindakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan.

Sedangkan Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitas politis, sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Jika dicermati, politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang suatu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang. Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. Menurut Hellner (1994:4) politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai suatu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas particular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial suku, agama, budaya, gender, dan antargolongan

Selanjutnya Masri (2022) berpandangan sebagai professor yang menekuni ilmu sosiologi dan komunikasi melihat bahwa politik identitas dalam perspektif sosiologi akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia menuju pemilihan presiden 2024. Karena kondisi mental dan masyarakat Indonesia belum terlepas dari sentiment primordialisme dan sektarianisme yang masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia sekalipun sudah hidup di era demokratisasi terbuka dan era digitalisasi modern.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana metode ini untuk mengeksplorasi dan memahami

suatu fenomena mengenai isu politik identitas yang kontroversi dan dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini ialah menggunakan Observasi, study kepustakaan, study literatur dari media sosial dan internet untuk mendapatkan hasil dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Politik Identitas

Istilah politik identitas sudah lama dikonstruksi sebagai narasi politik oleh kelompok elit politik tertentu di Indonesia sebagai wacana instrument untuk menggambarkan rasa kebencian dan ketakutan kalah pada pihak lawan politiknya agar bisa menurunkan citra dan menyudutkan pigur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi menang, bisa mengalahkan lawan lainnya sehingga perlu disudutkan dengan narasi-narasi tidak nasionalis dan intoleran.

Sebenarnya semua kerja-kerja politik di Indonesia tidak lepas dari politik identitas, sebab politik selalu membutuhkan instrumen atau kendaraan media untuk menyatakan diri lewat identitas seperti suku, agama, budaya, gender, dan antargolongan. Maka kalau pengertian politik identitas ini kita sepakati maka semua elite politik Indonesia dan pekerja politik masuk kategori pengguna politik identitas.

Namun, dalam perjalanannya, politik identitas justru dibajak dan direngkuh oleh kelompok mayoritas dan memanfaatkan dominasi kekuasaan. Penggunaan politik identitas untuk meraih kekuasaan, yang justru semakin mengeraskan perbedaan dan mendorong pertikaian itu, bukan berarti tidak menuai kritik tajam. Politik identitas seakan-akan meneguhkan adanya ketuhanan yang bersifat esensialistik tentang keberadaan kelompok sosial tertentu berdasarkan identifikasi primordialitas.

Terdapat beragam sudut pandang dalam melihat fenomena politik identitas. Berikut tiga perspektif dalam mengkaji politik identitas yaitu:

1. Primordilisme

Primordialisme yang melihat fenomena agama dalam kategori sosio-biologis. Pandangan ini berpandangan bahwa kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang diberikan dan tidak bisa dibantah. Secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas

2. Konstruktivisme

Konstruktivisme memandang identitas budaya dan agama, sebagai hasil dari proses yang kompleks, manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun, oleh manfaat mitologi yang berlangsung melalui bahasa maupun pengalaman masa lampau.

Pada batas ini, para aktor berupaya mengeksploitasi symbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnis tertentu yang berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial. Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri dan harga diri baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah, ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi.

3. Instrumentalisme

Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik, menurut pandangan ini, manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal atnisitas seperti kebangsaa, agama, ras dan Bahasa, maka pada saat tersebut, kelompok itu sedang melakukan mobilisasi kepentingan mereka. Kalangan ini menjelaskan bahwa identitas etnis dan agama senantiasa dijadikan sebagai sarana elit politik memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa mereka yang minoritas akan cenderung dijadikan sebagai alat untuk mengeuntungkan kelompok mayoritas.

Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut. Pembiaran terhadap konflik yang dilatar belakangi oleh politik identitas yang beragam akan menciptakan ketidakstabilan negara.

Isu Politik Identitas

Isu politik identitas adalah topik yang terkait dengan identitas seseorang atau kelompok, seperti etnis, agama, Bahasa, jenis kelamin, orientasi seksual, dan sebagainya. Isu ini berkaitan dengan hak-hak, perlindungan, dan pengakuan identitas dari kelompok-kelompok tersebut dalam kehidupan politik dan sosial.

Isu politik identitas dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya:

1. Diskriminasi

Kelompok tertentu mungkin merasa bahwa mereka tidak diakui atau diperlakukan secara adil oleh pemerintah atau masyarakat. Mereka mungkin mengalami diskriminasi dalam hal akses ke lapangan kerja, Pendidikan, Kesehatan dan sebagainya.

2. Pengakuan

Kelompok tertentu mungkin merasa bahwa identitas mereka tidak diakui atau dihormati oleh masyarakat atau pemerintah. Mereka mungkin ingin mendapatkan pengakuan yang lebih besar terhadap identitas mereka, seperti pengakuan resmi sebagai kelompok etnis atau agama.

3. Otonomi

Kelompok tertentu mungkin ingin memperoleh otonomi lebih besar dalam kehidupan politik dan sosial. Mereka mungkin ingin memiliki lebih banyak kendali atas wilayah atau memiliki hak untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi kelompok mereka.

4. Representasi

Kelompok tertentu mungkin merasa bahwa mereka tidak diwakili secara adekuat dalam Lembaga-lembaga politik atau sosial. Mereka mungkin ingin memiliki lebih banyak perwakilan dalam posisi kekuasaan atau lebih banyak suara dalam proses keputusan politik.

Faktor yang Mendorong Terciptanya Isu Politik Identitas

Politik identitas bersifat positif berarti menyengol, mengakui dan menerima perbedaan, bahkan lebih mengakui predikat keistimewaan di suatu daerah daripada di daerah lain, karena alasan historis dan logis. Bersifat negatif jika terjadi diskriminasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, misalnya jika mayoritas diuntungkan atas minoritas. Dominasi dapat dihasilkan dari perjuangan kolektif dan menjadi lebih berbahaya jika dibenarkan oleh negara. Ada beberapa faktor yang mendorong isu politik identitas seperti:

1. Perbedaan suku, agama, gender, ras dan antargolongan

Perbedaan dalam hal suku, agama, gender, ras dan antargolongan dapat menyebabkan perbedaan dalam nilai dan pandangan hidup yang berpotensi menyebabkan konflik. Misalnya, di beberapa negara yang memiliki sejarah panjang konflik antara kelompok etnis, atau agama yang berbeda, isu politik identitas dapat muncul sebagai hasil dari perbedaan-perbedaan ini.

2. Pengaruh Kebijakan

Kemunculan fenomena politik identitas tidak lepas dari pengaruh lahirnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca runtuhnya era Orde Baru. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 semakin memperjelas bahwa aktor politik lokal memakai identitas etnis secara insentif untuk memperoleh kekuasaan. Manifestasi kebijakan desentralisasi memberikan angin segar dalam penguatan politik identitas, narasi “memilih calon pemimpin berdasarkan kesamaan latar belakang” lebih mudah dibentuk dan dimobilisasi dalam ranah lokal.

3. Globalisasi dan Masyarakat Global

Globalisasi juga turut mempengaruhi praktik politik identitas di Indonesia, secara definisi globalisasi mengacu pada percepatan pergerakan dan pertukaran (manusia, barang dan jasa, modal, teknologi atau praktik budaya). Dengan hadirnya teknologi yang semakin pesat, banyak masyarakat yang menggunakan internet karena dapat menyatukan individu secara non fisik dan tidak dalam satu tempat yang sama melalui media perantara, yakni media sosial.

Perkembangan tipologi masyarakat informasi menjadikan media sosial sebagai sumber pemenuhan kebutuhan informasi sehingga pengguna media sosial di khalayak publik sangat tinggi. Melihat tingginya penggunaan media sosial, tidak sedikit para calon kader politik yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat untuk mendapatkan dukungan, bahkan media sosial juga dijadikan alat kampanye politik. Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul yang diberikan oleh negara Indonesia sebagai negara demokrasi mendorong masyarakat untuk beropini tanpa batas di media sosial. Hal ini semakin memperjelas bahwa teknologi berperan penting dalam menciptakan opini publik dan mengatur agenda politik. Namun sayangnya, kehadiran teknologi dan keterbukaan media sosial disalahgunakan untuk menyampaikan ujaran kebencian yang menjerumus kepada politik identitas.

4. Kependudukan dan Demografi

Negara Indonesia dikepalai oleh seorang presiden, ia menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dari ketujuh presiden yang pernah menjabat, enam

diantaranya berasal dari etnis Jawa dan hanya satu yang berasal dari Sulawesi, yaitu BJ Habibie. Mengapa presiden Indonesia didominasi oleh etnis Jawa? Pertanyaan ini dapat dijawab melalui struktur kependudukan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, dengan jumlah 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen dari total penduduk Indonesia. Realitas sosial bahwa penduduk di Indonesia terpusat di Pulau Jawa memiliki implikasi terhadap representasi politik, dimana sistem pemilihan yang berlangsung di Indonesia adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, dominasi hak pilih suaraterpusat di Pulau Jawa, bukan tidak mungkin populasi yang sangat besar ini ingin diwakili oleh seorang pemimpin yang berasal dari etnis Jawa. Ditambah dengan sensitifnya politik di Indonesia yang bernuansa SARA dan menjaga suasana politik yang kondusif, lebih aman jika sosok kepemimpinan berasal dari kelompok mayoritas.

5. Politik dan Kepentingan Elit

Isu politik identitas juga dapat dimanipulasi oleh politisi atau kelompok-kelompok elit untuk kepentingan politik mereka. Mereka dapat menciptakan isu-isu yang memecah belah masyarakat dengan tujuan memperoleh dukungan politik dari kelompok tertentu.

Upaya pencegahan dalam Meminimalisir Maraknya Isu Politik Identitas

Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini yang memiliki kepentingan dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia memberika upaya pencegahan dalam meminimalisir isu politik identitas yakni:

1. Promosi kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman, hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, edukasi, dan kegiatan yang menampilkan keberagaman sosial, budaya dan agama.
2. Meningkatkan dialog antar kelompok, diskusi terbuka dan konstruktif anatar kelompok yang berbeda dapat saling membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman.
3. Menghindari retorika yang memperburuk isu politik identitas, para pemimpin politik harus menghindari penggunaan retorika yang memperburuk isu politik identitas dan lebih mempromosikan pemahaman dan kesatuan.
4. Memastikan keadilan dan kesetaraan, meningkatkan akses dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang identitas mereka, dapat membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat persatuan.
5. Mendorong media yang bertanggungjawab, media harus bertanggungjawab dalam melaporkan berita dan informasi, menghindari diskriminasi dan mempromosikan keberagaman.
6. Membentuk kelompok lintas budaya dan agama, kelompok seperti ini dapat memfasilitasi dialog dan interaksi antara kelompok yang berbedadan mempromosikan pemahaman dan Kerjasama.
7. Edukasi Politik, meningkatkan edukasi politik kepada masyarakat karena saat ini Pendidikan politik masyarakat masih sangat rendah sehingga perlu melakukan hal ini.

KESIMPULAN

1. Politik identitas adalah strategi politik yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan politik dengan mempengaruhi opini publik menggunakan pendekatan identitas kelompok tertentu, seperti suku, agama, gender, budaya dan antargolongan.
2. Upaya yang digunakan dalam pencegahan isu politik identitas ialah, meningkatkan dialog antar kelompok, promosi kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman, menghindari retorika yang memperburuk isu politik identitas, memastikan keadilan dan kesetaraan, mendorong media yang bertanggungjawab, serta edukasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesia Tera.
- Afala, L. M. (2018). *Politik Identitas di Indonesia*. Malang. UB Press.
- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol.28 no. (2), 111-116.
- Ardial. (2010). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Index.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Dramedia Pustaka Utama.
- Canggara, H. (2009). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Diajeng, A. (2019). Representasi Politik Identitas Jokowi Dalam Video “Kangen” Produksi Muslim Millenial.
- Djalal, F dan Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasa Pengantar*.
- Undang-undang NRI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

**POLITIK IDENTITAS DALAM KONTROVERSI ISU DI
INDONESIA**

Dinar Astuti¹, Andi Agustang², Idham Irwansyah Idrus³

DOI: <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>

